

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Untuk Kawasan Minapolitan Mayangan Kota Probolinggo

Suning*, Lafiyana Eka Cahyaningtias

^{1,2}Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

¹Email: suning@unipasby.ac.id

Abstrak

Mayangan merupakan Kawasan Minapolitan perikanan tangkap Kota Probolinggo yang didukung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) kelas C yang melayani kawasan regional Jawa Timur serta memiliki kapal angkut perikanan minimal 10 GT. Infrastruktur pendukung Kawasan Minapolitan meliputi Sub-Sistem Minabisnis Hulu, Sub-Sistem Usaha Produksi, Sub-Sistem Hilir Pengolahan, Sub-Sistem Hilir Pemasaran dan Sub-Sistem Penunjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur dan arahan kebijakan infrastruktur Kawasan Minapolitan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik komparasi dan foto mapping (zona) dan analisis Analytical Hierarchy Proses (AHP). Metode pengumpulan data dilakukan dengan sebar kuesioner, dokumentasi dan survey instansi. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan infrastruktur pendukung berdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2012 adalah Sub-Sistem Minabisnis Hulu di PPP Mayangan sebesar 87%, Sub-Sistem Usaha Produksi sebesar 100%, Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil sebesar 100%, Sub-Sistem Hilir Pemasaran sebesar 67% dan Sub-Sistem Penunjang sebesar 100%. Berdasarkan penentuan prioritas Arahan Kebijakan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan dengan menggunakan Analisis Hierarki Proses (AHP) menunjukkan Sub-Sistem Minabisnis Hulu sebesar 1,988 merupakan prioritas utama, Sub-Sistem Hilir Pemasaran sebesar 1,578 prioritas kedua, Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil sebesar 1,019, prioritas ketiga, Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan sebesar 0,905 sebagai prioritas keempat dan Sub-Sistem Penunjang sebesar 0,510 merupakan prioritas kelima.

Kata kunci: Infrastruktur, Komparasi, Minapolitan

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Ditinjau dari garis pantai wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (Dahuri, 2001). Keterlibatan masyarakat pesisir dalam pembangunan di wilayahnya sangat penting karena menyangkut diri mereka yaitu sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sejak awal adanya pembangunan (Nikijuluw, 2001).

Karakteristik masyarakat pesisir secara sosial-ekonomi masih tergolong rendah dari sisi kesejahteraan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penduduk yang sebagian besar mencari nafkah dengan menangkap ikan dalam skala kecil. Persoalan ini harus dapat diatasi dengan melakukan beberapa alternatif kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian (Tuwo, 2011). Mata pencaharian tersebut erat hubungannya dengan sisi kebudayaan, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kusnadi (2006) masyarakat pesisir jika dilihat dari sisi kebudayaan memiliki indikator kualitatif diantaranya; 1) tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi, individu, rumah tangga dan masyarakat, 2) kelembagaan ekonomi berfungsi secara optimal, 3) kelembagaan sosial berfungsi secara baik, 4) berkembangnya kemampuan masyarakat atas sumber daya ekonomi, informasi dan teknologi, 5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayah pesisir kawasan ekonomi menjadi pusat-pusat pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang memiliki daya tarik investasi.

Merujuk pada persoalan dan karakteristik kawasan pesisir, maka salah satu strategi pengembangannya dapat dilakukan dengan membangun minapolitan. Tujuannya adalah agar masyarakat pesisir dapat meningkatkan perubahan status sosial- ekonomi dengan baik. Minapolitan merupakan suatu proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi untuk mewujudkan Kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui monitoring) secara berkala untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program (Wiadnya, 2011).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kawasan Minapolitan perikanan tangkap Kota Probolinggo berada pada Kecamatan Mayangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menetapkan Kota Probolinggo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Kawasan Minapolitan yang didukung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan masuk sebagai kelas C yang melayani kawasan regional Jawa Timur, serta didukung kapal angkut perikanan minimal 10 GT. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor

02 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, rencana struktur ruang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kota dan Wilayah Pengembangan dengan fungsi utama sebagai Pelabuhan Barang, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pelabuhan Penumpang, Industri dan Pergudangan. Data dari Dinas Perikanan hasil produksi perikanan unggulannya adalah ikan kerapu dan rata-rata 5 tahun terakhir hasil produksi perikanan sebesar 17.612,9 ton. Infrastruktur pendukung minapolitan yang tersedia di wilayah penelitian diantaranya; kios-kios saprokan, gudang penyimpanan, pelataran parkir, tempat bongkar muat barang, SPBU/SPDN, fasilitas Pelabuhan dan armada penangkapan ikan, sumur bor, PDAM dan HIPAM, jalan akses sentra produksi ke pusat pengumpul, unit pengolahan modern, tempat penjemuran ikan, industri kecil, pasar tradisional, jalan antar Desa-Kota dan jembatan, sarana utilitas, sarana pelayanan umum dan sarana kelembagaan.

Penelitian Wulan, Bambang dan Faikkhurohman (2017) tentang Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Ditinjau Dari Aspek Produksi, Kota Probolinggo, Jawa Timur dapat dikatakan bahwa kondisi fasilitas pelabuhan perikanan Pantai Mayangan untuk pengembangan pelabuhan masih cukup baik karena fasilitas-fasilitas tersebut dalam kondisi masih bagus, namun dibutuhkan perbaikan sistem pengelolaan limbah agar tidak merusak lingkungan serta perbaikan tempat docking kapal yang memadai.

Adapun kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan Minapolitan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah:

1. Sub-Sistem Minabisnis Hulu :Kios – kios saprokan (sarana produksi perikanan); Gudang; Palataran parkir; Tempat bongkar muat barang dan peralatan saprokan; Dok; Pabrik jaring; SPBU/SPDN.
2. Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan (fisheres production business): Penyediaan fasilitas pelabuhan dan armada penangkapan; Penyediaan air baku untuk peningkatan produksi, melalui saluran irigasi tambak, sumur bor dan sprinkler; Penyediaan air bersih untuk pencucian hasil, melauai sistem perpiaan atau sumur dalam; Jalan usaha/akses dari sentra produksi ke pusat pengumpul atau pengolah.
3. Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil: Unit pengolahan modern (pengalengan, dll); Sarana penjemuran hasil perikanan dan tempat penjemuran ikan; Gudang penyimpanan hasil perikanan, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendingin (cold storage) packing house, sebagai tempat sortasi dan pengepakan; Sarana industri kecil termasuk food service seperti tempat pembuatan kripik, dodol, manisan, juice, sari, saos, aero catering.
4. Sub-Sistem Hilir – Pemasaran: Pasar tradisional, kios-kios, los pasar berikut pelataran parkir dan tempat bongkar muat; Prasarana dan sarana sub Sistem Terminal Minapolitan

(STM), Jalan antar Desa-Kota dan jembatan, yang dapat memperlancar pemasaran hasil sampai outlet.

5. Sub-Sistem Penunjang (koordinasi dengan instansi terkait lainnya): Sarana utilitas umum seperti : jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telepon dan internet; Sarana pelayanan umum seperti : sarana pembelanjaan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau; Sarana kelembagaan seperti : badan pengelola, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha lainnya.

Beberapa infrastruktur pendukung minapolitan sesuai Permen Kelautan dan Perikanan tersebut diatas, Lamia (2017) juga menjelaskan bahwa Infrastruktur pendukung minapolitan dapat dilengkapi dengan melihat tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan Prasetyowati (2017) menyatakan infrastruktur pendukung minapolitan adalah dengan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan dalam hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya ikan, fasilitas pelabuhan dan tingkat pemanfaatan.

METODE

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pesisir Minapolitan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi di lokasi penelitian, sebar kuesioner kepada responden terpilih (expert) yaitu dari Dinas Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan wawancara mendalam kepada masyarakat sekitar kawasan minapolitan. Data sekunder didapat dari Dinas terkait yang sudah dipublikasikan baik dalam bentuk buku hard maupun file (elektronik). Teknik analisis data dilakukan secara komparasi yang disajikan secara spasial (foto mapping) atas kondisi empiris infrastruktur minapolitan. Untuk mendapatkan prioritas arahan kebijakan terhadap infrastruktur pendukung minapolitan dilakukan teknik analisis AHP (analisis hierarki proses). Proses yang dilakukan adalah dengan mengkode data jawaban dari responden yang dianggap ekspert dibidangnya (memahami kondisi empiris minapolitan Mayangan) kemudian dilakukan analisis dengan data hasil kuantitatif yang diperoleh dari input data software expert choice 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Minapolitan Mayangan

1. Sub-Sistem Minabisnis Hulu

Ketersediaan infrastruktur sub-sistem minabisnis hulu di Kawasan Minapolitan Mayangan terdiri dari kios-kios saprokan (sarana produksi perikanan), gudang penyimpanan (cold storage), pelataran parkir, tempat bongkar muat barang, dok, SPBU/SPDN dan pabrik jaring. Pabrik jaring pada kawasan minapolitan mayangan masih belum tersedia.

2. Sub-Sistem Usaha Produksi

Ketersediaan infrastruktur sub-sistem usaha produksi di Kawasan Minapolitan Mayangan terdiri dari fasilitas pelabuhan dan armada penangkapan seperti dermaga pelabuhan, alur pelayaran, penahan gelombang (breakwater) dan turap (revertment), kolam pelabuhan, jalan kompleks, drainase dan lahan sudah terfasilitasi. Kemudian penyediaan air baku untuk produksi perikanan rata-rata semuanya menggunakan irigasi tambak, PDAM dan juga terdapat sumur bor. Penyediaan air bersih untuk penyucian sudah menggunakan PDAM dan jalan akses sentra produksi ke pusat pengumpul melalui jalan lingkar utara dengan jenis pengkerasan aspal dan sebagian beton dengan keadaan kondisi baik.

3. Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil

Ketersediaan infrastruktur sub-sistem hilir pengolahan hasil di Kawasan Minapolitan Mayangan terdiri unit pengolahan modern antara lain PT Sukses Lautan, CV Bee Jay Seafoods, PT Lautan Berlian Indah, PT Berkah Aneka Laut, PT Kelola Mina Internasional (KMI), Perum Perikanan Indonesia. Tempat penjemuran ikan antara lain UMKM Pelita Berkah, UMKM Pesisir Utara, UMKM Mayang Setha, UMKM Mina Kepiting, UMKM Kerang Jaya dan UMKM Mina Jaring Jaya. Gudang Penyimpanan antara lain sama seperti pengolahan modern karena memiliki gudang penyimpanan serta adanya cold storage milik pemerintah.

4. Sub-Sistem Hilir Pemasaran

Ketersediaan infrastruktur sub-sistem hilir pemasaran di Kawasan Minapolitan Mayangan terdiri dari pasar tradisional dengan kondisi yang baik, Sub-Terminal Minapolitan (STM) belum tersedia pada Kawasan Minapolitan Mayangan dan Jalan Desa-Kota dengan jenis pengkerasan aspal dalam kondisi baik.

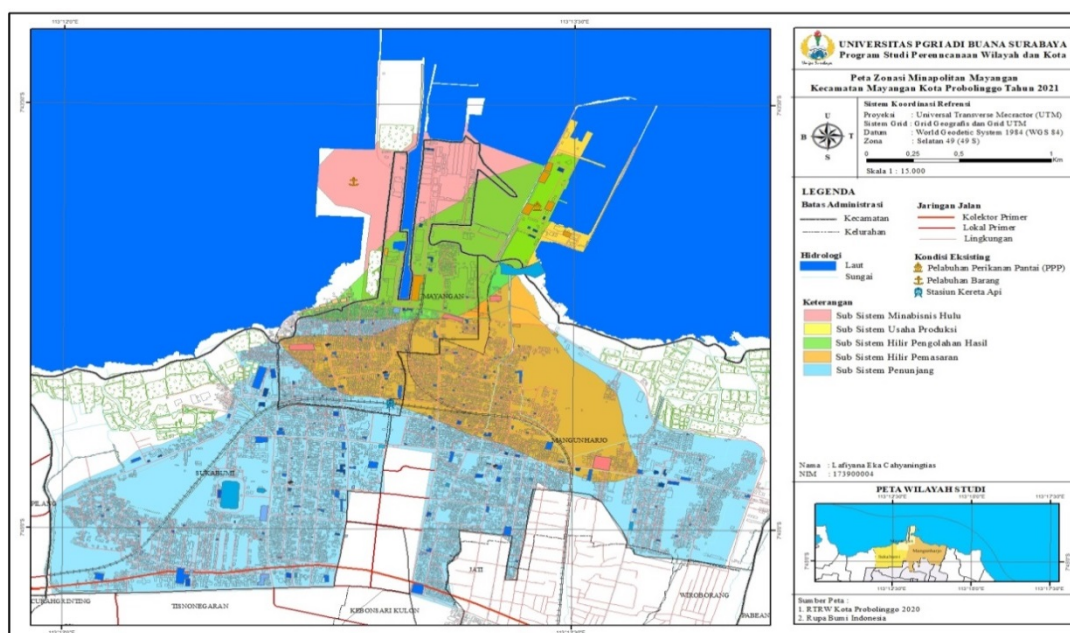
5. Sub-Sistem Penunjang

Ketersediaan infrastruktur sub-sistem penunjang di Kawasan Minapolitan Mayangan terdiri dari sarana utilitas antara lain jaringan air bersih, jaringan sanitasi, jaringan persampahan, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon dan internet. Sarana pelayanan umum antara lain sarana pembelanjaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana peribadatan, sarana rekreasi/ olahraga dan sarana ruang terbuka hijau. Sarana kelembagaa antara lain badan pengolahan, kantor perbankan, koperasi.

Berdasarkan hasil analisis komparasi berdasarkan infrastruktur pendukung Kawasan Minapolitan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah zona: (Gambar 1)

1. Sub-Sistem Minabisnis Hulu Minapolitan berada pada PPP Mayangan Kecamatan Mayangan sudah tersedia 87%

2. Sub-Sistem Usaha Produksi berada pada PPP Mayangan dan Kelurahan Mayangan sudah tersedia 100%
3. Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil berada pada PPP Mayangan, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo sudah tersedia 100%
4. Sub-Sistem Hilir Pemasaran berada pada PPP Mayangan, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo sudah tersedia 67%
5. Sub-Sistem Penunjang berada pada Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Sukabumi sudah tersedia 100%

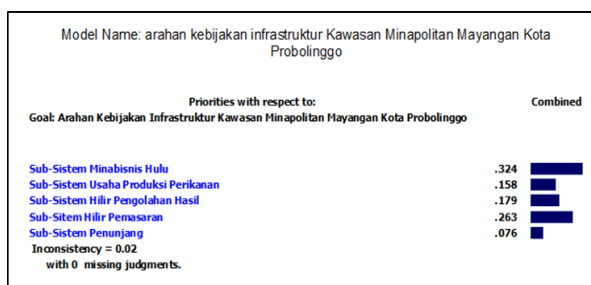


Gambar 1. Peta Zonasi Infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan Tahun 2021

Arah Kebijakan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan

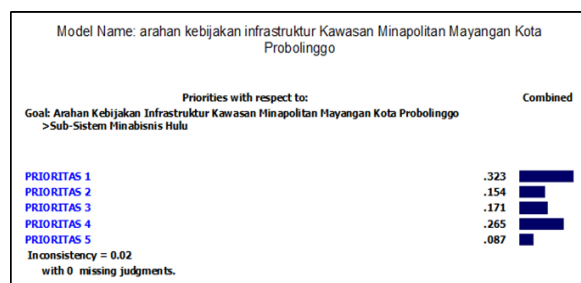
Hasil analisis AHP ini merupakan hasil kompilasi dari seluruh responden yang digunakan baik dari stakeholder maupun dari masyarakat dan tokoh masyarakat, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perbandingan berpasangan pada level kriteria, diketahui nilai sub-sistem minabisnis hulu memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya sebesar 0,324 dengan rasio inkonsisten 0,02 lebih kecil dari 0,1. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 2



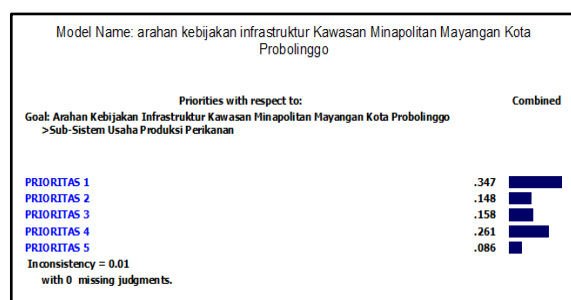
Gambar 2. Nilai Perbandingan Berpasangan Level Kriteria

- Perbandingan berpasangan pada level Sub-Sistem Minabisnis Hulu, diketahui nilai prioritas 1 memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya sebesar 0,323 dengan rasio inkonsisten 0,02 lebih kecil dari 0,1. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 3



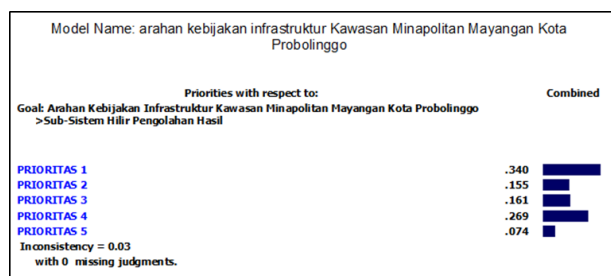
Gambar 3. Nilai Perbandingan Berpasangan Sub-Sistem Minabisnis Hulu

- Perbandingan berpasangan pada level Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan, diketahui nilai prioritas 1 memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya sebesar 0,347 dengan rasio inkonsisten 0,01 lebih kecil dari 0,1. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 4



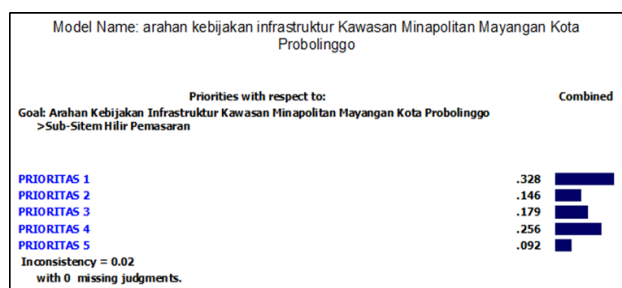
Gambar 4. Nilai Perbandingan Berpasangan Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan

- Perbandingan berpasangan pada level Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil, diketahui nilai prioritas 1 memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya sebesar 0,340 dengan rasio inkonsisten 0,03 lebih kecil dari 0,1. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 5



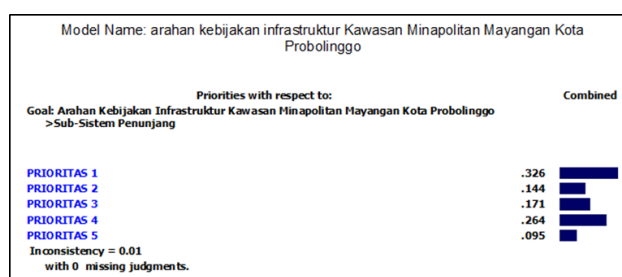
Gambar 5. Nilai Perbandingan Berpasangan Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil

- Perbandingan berpasangan pada level Sub-Sistem Hilir Pemasaran, diketahui nilai prioritas 1 memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya sebesar 0,328 dengan rasio inkonsisten 0,03 lebih kecil dari 0,2. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 6



Gambar 6. Nilai Perbandingan Berpasangan Sub-Sistem Hilir Pemasaran

- Perbandingan berpasangan pada level Sub-Sistem Penunjang, diketahui nilai prioritas 1 memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya sebesar 0,326 dengan rasio inkonsisten 0,03 lebih kecil dari 0,1. Nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 7



Gambar 7. Nilai Perbandingan Berpasangan Sub-Sistem Penunjang

Selanjutnya dihasilkan prioritas dari kriteria yang telah dirunning sebagaimana yang tertera dalam grafik kriteria di atas, dengan menjumlahkan bobot rata-rata penilaian dari semua responden (Permadi, 1992). Prioritas dengan jumlah yang terbesar menjadi prioritas utama untuk penyusunan rencana kegiatan selanjutnya. Hasil prioritas dari 5 kriteria yaitu sub-sistem minabisnis hulu, sub-sistem usaha produksi perikanan, sub-sistem hilir pengolahan hasil, sub-sistem hilir pemasaran dan sub-sistem penunjang terhadap Arahan Kebijakan

Infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan Kota Probolinggo. Secara detail masing-masing kriteria terhadap prioritas dapat dilihat pada Tabel 1 kompilasi perhitungan prioritas.

Tabel 1. Hasil Kompilasi Perhitungan Prioritas

	CR 1 (goal)	CR 2 (Sub-Sistem Minabisnis Hulu)	CR 3 (Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan)	CR 4 (Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil)	CR 4 (Sub-Sistem Hilir Pemasaran)	CR 4 (Sub-Sistem Penunjang)	Jumlah	Prioritas
Prioritas 1	0,324	0,323	0,347	0,340	0,328	0,326	1,988	1
Prioritas 2	0,158	0,154	0,148	0,155	0,146	0,144	0,905	4
Prioritas 3	0,179	0,171	0,158	0,161	0,179	0,171	1,019	3
Prioritas 4	0,263	0,265	0,261	0,269	0,256	0,264	1,578	2
Prioritas 5	0,076	0,087	0,086	0,074	0,092	0,095	0,510	5

Berdasarkan Tabel 1 dapat dirumuskan urutan prioritas terkait dengan Arahan Kebijakan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan Kota Probolinggo yaitu;

1. Prioritas 1 menjadi urutan prioritas pertama adalah sub-sistem minabisnis hulu dengan menyediakan infrastruktur berupa pabrik jaring yang masih belum tersedia di Kawasan Minapolitan Mayangan sebesar 1,988.
2. Prioritas 4 menjadi urutan prioritas kedua adalah sub-sistem hilir pemasaran dengan menyediakan infastruktur berupa sub terminal minapolitan yang masih belum tersedia di Kawasan Minapolitan Mayangan sebesar 1,578.
3. Priositas 3 menjadi urutan prioritas ketiga adalah sub-sistem hilir pengolahan hasil karena ketersediaan infrastruktur di sub-sistem hilir pengolahan hasil sudah sesuai dengan arahan dari Permen Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2012 sebesar 1,019.
4. Prioritas 2 menjadi urutan prioritas keempat adalah sub-sitem usaha produksi perikanan karena ketersediaan infrastruktur di sub-sistem usaha produksi perikanan sudah sesuai dengan arahan dari Permen Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2012 sebesar 0,905.
5. Prioritas 5 menjadi urutan prioritas kelima adalah sub-sistem penunjang karena ketersediaan infrastruktur di sub-sistem penunjang sudah sesuai dengan arahan dari Permen Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2012 sebesar 0,510.

Arahan pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan Mayangan sejalan dengan hasil penelitian Retno Anjar Sari dan Ivan Chofyan di Kecamatan Galang Kota Batam (Sari & Chofyan, 2016).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Infrastruktur pendukung minapolitan Sub-Sistem Minabisnis Hulu Minapolitan berada pada PPP Mayangan Kecamatan Mayangan sudah tersedia 87%, Sub-Sistem Usaha Produksi berada pada PPP Mayangan dan Kelurahan Mayangan sudah tersedia 100%, Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil berada pada PPP Mayangan, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo sudah tersedia 100%, Sub-Sistem Hilir Pemasaran berada pada PPP Mayangan, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mangunharjo sudah tersedia 67%, dan Sub-Sistem Penunjang berada pada Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Sukabumi sudah tersedia 100%.
2. Arahan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis AHP adalah Prioritas 1 : Infrastruktur Sub-Sistem Minabisnis Hulu sebesar 1,988, Prioritas 2 : Infrastruktur Sub-Sistem Hilir Pemasaran sebesar 1,578, Prioritas 3 Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil sebesar 1,019, dan Prioritas 4 Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan sebesar 0,905, Prioritas 5 Sub-Sistem Penunjang sebesar 0,510.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Laboratorium PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Mahasiswa yang terlibat dalam pengambilan data dan sebar kuesioner, Dinas Bappeda Kota Probolinggo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo atas data-data yang diberikan dan seluruh team yang mendukung atas terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028.
- Anonim, 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- Anonim, 2012. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.
- Anonim, 2013. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
- Baharsya et.al. 2016. Fuzzy Analytical Hierarchy Process Topsis Untuk Seleksi Pada Anggota Paskibraka. Jurnal Ilmiah KLIK, 3(2), 156-171
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, D. M. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir

- Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Lamia, L. B., Rengkung, M. M., & Takumansang, E. D. 2017. Ketersediaan Prasarana Sarana Dalam Mendukung Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Minahasa Selatan. *SPASIAL*, 4(2), 19-27.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nikijuluw, P. H. V. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.
- Permadi, Bambang. 1992. *AHP Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Prasetyowati, W., Bambang, A. N., & Kurohman, F. 2017. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Ditinjau dari Aspek Produksi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6 (3), 11-19.
- Sari, R. A., & Chofyan, I. 2014. Arahana Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Galang Kota Batam. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2 (1), 95-104.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Wiadnya, D. G. R. 2001. *Konsep Perencanaan Minapolitan Dalam Pengembangan Wilayah*. Malang: Fakultas Perikanan Ilmu Kelaut Universitas Brawijaya.